

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja perusahaan merupakan salah satu ukuran keberhasilan atas pelaksanaan kinerja keuangan dalam perusahaan. Ukuran kinerja perusahaan yang baik diawali dengan adanya kepercayaan dari investor terhadap suatu perusahaan bahwa dana yang diinvestasikan dalam kondisi yang aman dan diharapkan akan memberikan *return* yang baik pula. Setiap perusahaan berkepentingan dengan pengukuran kinerja keuangannya. Apabila kinerja keuangan suatu perusahaan baik maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dana yang mereka miliki kepada perusahaan sehingga citra perusahaan juga akan meningkat. Keadaan ini akan membuat perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Untuk mendapatkan kinerja perusahaan yang baik maka perusahaan memerlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Good Corporate Governance mulai menarik perhatian publik Indonesia sejak 1998-an ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. *Asian Development Bank* (ADB), *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), Bozz-Allen & Hamilton, *World Bank*, dan *Pricewaterhouse Coopers* menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis adalah karena tidak dipenuhinya syarat-syarat pengelolaan korporasi yang memadai. Peristiwa ini mirip

dengan yang terjadi di Inggris pada tahun 1980-an ketika *Good Corporate Governance* menjadi perhatian publik akibat dari publikasi masalah-masalah korporasi seperti *creative accounting*, kebangkrutan perusahaan dalam skala besar, terbatasnya peran auditor, tidak jelasnya kompensasi manajer dengan kinerja perusahaan. Seperti kasus Lippo Bank yang menerbitkan 3 versi laporan keuangan yang berbeda untuk kepentingan yang berbeda pula atau Kimia Farma yang diduga melakukan penggelembungan laba sebesar 32,668 milyar rupiah (Sulistyanto dalam Mulyadi, 2016). Konsep *Corporate Governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak (Mulyadi, 2016).

Di Indonesia, konsep *Good Corporate Governance* diperkenalkan pada tahun 1999 setelah pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). KNKG mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia pada tahun 2000 yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Isi dari pedoman tersebut adalah setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *Good Corporate Governance* dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan tahunannya. Pedoman tersebut berhasil meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* di kalangan dunia usaha secara bertahap (KNKG, 2006). Untuk menyeragamkan penerapan *Good Corporate*

Governance tersebut termasuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum menjalankan praktek tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri (PERMEN) BUMN No. 01 pada tahun 2011 yang menegaskan PERMEN BUMN No. 117 pada tahun 2002, yang menyatakan BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan.

Di Indonesia, terdapat institusi independen yang sejak tahun 2001 telah rutin melakukan penilaian atas *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta, lembaga tersebut adalah *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG). IICG mengukur berbagai aspek, baik internal dan eksternal perusahaan yang mewakili komponen-komponen *Good Corporate Governance*. Beberapa komponen tersebut adalah ukuran dan komposisi dewan komisaris, komite-komite yang membantu dewan komisaris, dan komposisi kepemilikan saham perusahaan. Pada tahun 2001 terdapat 4 BUMN terbuka yang mengikuti penilaian ini, namun lambat laun semakin banyak perusahaan BUMN yang mengikuti, hingga pada tahun 2013 menjadi 10 perusahaan BUMN (Situmorang dan I Made, 2015). Dengan penerapan *Good Corporate Governnace* akan meningkatkan nilai perusahaan dan apabila hal itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara akan sangat baik dampaknya bagi perekonomian (Situmorang dan I Made, 2015).

Darmawati, dkk (dalam Mulyati, 2011) menyatakan bahwa *Good Corporate Govrnance* merupakan salah satu elemen kunci dalam

meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Good Corporate Governance* juga dapat digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen. Perilaku manipulasi oleh manajer dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi *Good Corporate Governance* merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi *Good Corporate Governance* berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktekkan *Good Corporate Governance* akan mengalami perbaikan citra dan peningkatan nilai perusahaan (Mulyati, 2011).

Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional dianggap mampu mempengaruhi profitabilitas perusahaan karena institusi menjadi pemegang saham mayoritas (Rimardhani, dkk 2016). Kepemilikan Institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya dalam memonitor manajemen. Semakin besar Kepemilikan Institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Dengan demikian proporsi Kepemilikan Institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Veno, 2015). Kepemilikan Institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Mulyadi, 2016). Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan

yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba .

Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro dalam Sabrina, 2010). Pendekatan keagenan menganggap struktur Kepemilikan Manajerial sebagai sebuah instrumen atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim (*claim holder*) terhadap perusahaan. Gunarsih (dalam Mulyati, 2011) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham. Ross, et al. (dalam Mulyati, 2011) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham guna meningkatkan kinerja perusahaan.

Dewan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan pembentukan Dewan Komisaris Independen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham dalam sebuah perusahaan. Dewan Komisaris Independen bertugas untuk memastikan adanya *Good Corporate Governance* dengan memberikan masukan serta pengawasan kepada Dewan Direksi untuk kepentingan perusahaan. Jumlah Dewan Komisaris Independen yang harus ada dalam

perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris (BEJ, 2004). Kinerja keuangan perusahaan akan baik jika perusahaan mampu mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham), salah satunya dengan keberadaan Komite Audit. Komite Audit diharapkan mampu mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengawasi sistem pengendalian internal sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 01/MBU/2011.

Dengan penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* diharapkan perusahaan mampu meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder* dan mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* secara baik mengalami peningkatan dan mengalami penurunan risiko yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dalam kaitan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan BUMN Yanag Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan?
5. Apakah Kepemilikan Institusional, Kepemilakan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
6. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah di dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan batasan ruang lingkup mengenai sesuatu atau hal yang akan dibahas, sehingga tidak akan menyimpang dari pokok persoalannya. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan dengan menggunakan perhitungan rasio Profitabilitas yaitu *Return of Asset* (ROA).
2. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* dengan mekanisme Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit.
3. Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data publikasi laporan keuangan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap kinerja perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap kinerja perusahaan.

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Investor

Dapat memberikan gambaran tentang keadaan bursa saham di Indonesia. Hal utama tentu untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat menentukan dan menerapkan strategi perdagangan di pasar modal.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam mengambil kebijakan yang akan ditempuh sehubungan dengan pergerakan *return* saham di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu dasar untuk menilai tingkat kinerja perusahaan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan.

4. Bagi Akademik

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan literatur bagi pihak lain yang melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan.

5. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas terkait dengan pengaruh *Good Corporate Governance* yang diterapkan dalam perusahaan sehingga dapat menciptakan kinerja perusahaan yang baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis merupakan bagian yang membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran adalah permasalahan yang akan diteliti dan

pengembangan hipotesis adalah dugaan yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan bagian yang menjelaskan penelitian dilakukan secara operasional. Pada bagian ini didiuraikan tentang metode penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan definisi operasional. Kemudian metode analisis data yang merupakan yang memuat penjelasan mengenai cara dan langkah-langkah sistematis pengolahan data. Selain itu menjelaskan alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan berisi penyajian secara singkat dari hasil pembahasan, saran dan keterbatasan penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.